



JURNAL ILMIAH HUKUM

DE'JURE

KAJIAN ILMIAH HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

JIH ~ DE'JURE	Vol. 1	No. 2	Halaman 185-419	September 2016	ISSN: 2442-7578
---------------	--------	-------	-----------------	----------------	-----------------

- ⊖ **PENYELESAIAN SENGKETA MENGENAI HAK MILIK SERTA BAGIAN ANAK ANGKAT DALAM WASIAT WAJIBAH**
Dedi Pahroji
- ⊖ **STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DAN IMPLEMENTASINYA ANTARA LEMBAGA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DAN SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE**
Grasia Kurniati
- ⊖ **PENGARUH SISTEM MULTIPARTAI TERHADAP KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL MENURUT UUD NRI TAHUN 1945**
Ida R. Hasan
- ⊖ **PENGATURAN PRAKTEK MEDIASI TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA**
Imam Budi Santoso
- ⊖ **PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR SEBAGAI OBYEK LANDREFORM UNTUK LAHAN PERTANIAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN**
Joko Satrianto Wibowo
- ⊖ **PENERAPAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN BAGI PELAKU PENCEMARAN CITARUM DI KARAWANG**
M. Holyone Nurdin Singadimedja
- ⊖ **KEWENANGAN BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN PASCA BERLAKUNYA POJK NOMOR 1/POJK.07/2013 DAN POJK NOMOR 1/POJK.07/2014 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH DI INDONESIA**
Nun Harrieti
- ⊖ **TINJAUAN NORMATIF TERHADAP TINGKAT PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA AUSTRIA**
Rohendra Fathammubina
- ⊖ **HAK KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI DAN PENERAPANNYA DI REPUBLIK INDONESIA**
R. Bagus Irawan
- ⊖ **TEORI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA**
Deni Nuryadi



JURNAL ILMIAH HUKUM DE'JURE KAJIAN ILMIAH HUKUM

Susunan Redaksi (Board of Editors)

Penanggung jawab (<i>Head of Advisor</i>)	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Mitra Bestari (<i>Peer Reviewer</i>)	:	Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H Dr. Bambang Daru, S.H., M.H Dr. Hernadi, S.H., LL.M
Pemimpin Redaksi (<i>Editor in Chief</i>)	:	Rahmi Zubaedah, S.H., M.H
Dewan Editor (<i>Editorial Board</i>)		
Manajer Editor (<i>Managing Editor</i>)	:	Pamungkas SP., S.H., M.H
Manajer Keuangan (<i>Manager in Finance</i>)	:	Siti Hamimah, S.H., M.H Asep Azis Hidayat Imam Nurzaman Dwi
Manajer Pemasaran (<i>Manager in Marketing</i>)	:	Toto Toip Mansyur Anden
Editor Bahasa Indonesia (<i>Editor in Indonesia Language</i>)	:	Slamet, S.Pd., M.Pd
Editor Bahasa Inggris (<i>Editor in English Language</i>)	:	Dini, S.Pd., M.Pd
Editor Tata Letak & Sampul (<i>Layout & Cover</i>)	:	Ahmad Mubarak, S.Ds., M.M Ilham Fitrahriansyah
Penerbit (<i>Publisher</i>)	:	Lembaga Kajian Hukum (LKH) Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Alamat (*Address*) Redaksi:

REDAKSI JURNAL ILMIAH HUKUM DE'JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM

J I H ~ DE'JURE ~ K I H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Karawang

Telp. (0267) 640759; Faks. (0267) 640759

Website: www.fh.unsika.ac.id

Email: jurnaldejurefhunsika@gmail.com

Jurnal ini dapat diunduh pada menu e-jurnal pada laman <http://journal.unsika.ac.id/>



**JURNAL ILMIAH HUKUM
DE'JURE
KAJIAN ILMIAH HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**

Volume 1 Nomor 2

ISSN: 2442-7578

September 2016

J I H ~ DE'JURE merupakan Jurnal Ilmiah Hukum yang memuat naskah di bidang ilmu hukum serta analisis dan peran serta akademisi, praktisi dan masyarakat dalam merepresentasikan kebebasan berpendapat dan pembahasan soal isu-isu di bidang hukum.

J I H ~ DE'JURE merupakan media publikasi ilmiah yang terbit sebanyak dua nomor dalam satu tahun (Mei dan September).

**Setiap substansi Jurnal dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
(Citation is permitted with acknowledgement of the source)**

**Segala pendapat yang dimuat dalam Jurnal
ini tidak mewakili pendapat resmi dari
Fakultas Hukum Universitas
Singaperbangsa Karawang**



J I H ~ DE'JURE ~ K I H Redaksi

Sidang Pembaca yang dirahmati Tuhan yang Maha Esa

Jurnal Ilmiah Hukum “De’Jure” merupakan Jurnal Ilmu Hukum yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian serta kajian gagasan konseptual di bidang ilmu hukum terhadap isu-isu hukum, konseptual dalam tataran teori dan praktik, putusan pengadilan, analisis kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah serta analisis hal-hal lainnya di bidang ilmu hukum yang tidak dapat terlepas sebagai ilmu pengetahuan. Jurnal Ilmiah Hukum “De’Jure” merupakan hasil penelitian berupa tulisan baik dari kalangan civitas akademika Universitas Singaperbangsa Karawang pada umumnya maupun hasil sumbangsi Tenaga Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang serta peran aktif dari penulis-penulis lain di luar Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa/i, masyarakat, para pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM serta pemerhati ilmu hukum.

Jurnal Ilmiah Hukum “De’Jure” telah memiliki *International Standard Serial Number-ISSN* (Nomor Seri Standar Internasional) sebagai sebuah nomor khusus yang sering digunakan untuk mengidentifikasi setiap publikasi berkala dan diberikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0005.115/JL.3.2/SK.ISSN/2015.03. Volume ini diyakini dapat memberikan sentuhan dan warna baru di dalam perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Indonesia. Harapan Tim Redaksi yaitu dapat memberikan sumbangsi pemikiran/gagasan pada pembaharuan Hukum Indonesia dan setidaknya-tidaknya memberikan secerca sinar terang dalam hutan belantara nan gelap sebagai ungkapan terhadap pengaturan dan penerapan Hukum Indonesia dengan keyakinan Indonesia akan menjadi lebih bermartabat berdasarkan Pancasila.

Terdapat sekitar sepuluh (10) naskah yang mengkaji dan menganalisis tentang dinamika ilmu hukum dan penerapannya yang diawali oleh Dedi Pahroji yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah” Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu yang bermaksud menguraikan/menggambarkan kewenangan Pengadilan Agama Klas IIA Kab. Karawang dalam menyelesaikan sengketa mengenai hak milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah.

Kedua, terdapat tulisan dari Grasia Kurniati yang berjudul “Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan *Singapore International Arbitration Centre*” yang membahas mengenai forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dikenal saat ini adalah Arbitrase Nasional dan Arbitrase Internasional di Indonesia dan Singapura. Arbitrase Internasional adalah suatu metode yang sangat dikenal yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang terikat dalam suatu kontrak bisnis internasional. Ketiga, tulisan dari Ida R. Hasan yang berjudul

“Pengaruh Sistem Multi Partai Terhadap Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945”. Tulisan tersebut menekankan bahwa Sistem Multi Partai ini telah berlangsung sejak tahun 1945 dan berjalan sampai saat ini meskipun beberapa kali telah berganti sistem pemerintahan. Pasca reformasi, sistem demokrasi di Indonesia memasuki era baru khususnya dalam pemilu di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan Presidensiil sistem multi partai berpengaruh terhadap sulitnya pasangan calon Presiden dan wakil presiden menghasilkan suara mayoritas dalam pemilu. Keempat, Imam Budi Santoso selaku Kepala Program Studi S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang ikut serta dalam memberikan kontribusi melalui tulisan yang berjudul “Pengaturan Praktek Mediasi Terhadap Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia” di mana mempersoalkan tentang perselisihan hubungan industrial sering kali memicu konflik antara pekerja/serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha sehingga memerlukan cara atau formula penyelesaian sengketa diantara keduanya yang dapat mengayomi dan memberikan solusi yang dapat diterima oleh para pihak.

Kelima, Joko Satrianto Wibowo yang berjudul “Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Obyek *Landreform* Untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan” yang menegaskan bahwa Saat ini tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang baru berdasarkan perolehan tanah di beberapa wilayah banyak dalam keadaan terlantar, sehingga cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan tidak optimal yang perlu untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat. Keenam, M. Holyone Nurdin Singadimedja dengan tulisan yang berjudul “Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran Citarum Di Karawang” memberikan pendapat bahwa terdapat dinamika penerapan hukum pidana yang memiliki kendala dalam bingkai otonomi daerah di Republik Indonesia khususnya pencemaran pada media lingkungan seperti Sungai Citarum yang meliputi Daerah Aliran Sungai Citarum di Kabupaten Karawang. Ketujuh, Nun Harrieti yang berjudul “Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Pasca Berlakunya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah Di Indonesia” memberikan pandangan bahwa Sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi perbankan telah beralih secara efektif dari Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut dengan OJK), sehingga saat ini kewenangan BI mencakup kebijakan moneter dan dalam lalu lintas pembayaran.

Kedelapan, Rohendra Fathammubina memberikan kontribusi tulisan yang berjudul “Tinjauan Normatif Terhadap Tingkat Peradilan Administrasi Negara Indonesia dengan Peradilan Administrasi Negara Austria” dengan menganalisis tentang indikator dari eksistensi lembaga kekuasaan kehakiman yaitu peradilan administrasi negara yang bebas dan mandiri yang dapat mengakomodir berbagai bentuk persoalan sebagai pengejawantahan hukum dinamis. Penelitian mencoba mengkaji tingkat peradilan administrasi di negara Indonesia dan Austria di mana perlunya suatu pengkajian peran

peraturan perundang-undangan dan penegak hukum untuk mewujudkan peradilan yang lebih independen dan akuntabel sehingga dapat mencapai cita negara hukum dan maksud pembentukan sistem kekuasaan kehakiman terhadap peran dan eksistensi peradilan administrasi yang merepresentasikan ciri negara hukum yang seyogianya ditujukan bagi kepentingan dan kemaslahatan rakyat, khususnya dalam konteks Indonesia. Kesembilan yaitu R. Bagus Irawan yang memberikan kontribusi melalui tulisan yang berjudul "Hak Konstitusional Presiden Dalam Memberikan Grasi dan Penerapannya di Republik Indonesia" Pemberian grasi oleh kepala negara telah sejak lama dikenal orang dalam sejarah. Pemberian grasi itu sebagai "suatu pernyataan dari kekuasaan yang tertinggi yang menyatakan bahwa akibat-akibat menurut hukum pidana dari suatu delik itu menjadi ditiadakan, baik seluruhnya maupun sebagian". Pandangan hukum dewasa ini, lembaga tersebut tidak boleh lagi dipergunakan sebagai kemurahan kepala negara, melainkan harus digunakan sebagai alat untuk meniadakan ketidakadilan yaitu apabila hukum yang berlaku di dalam pemberlakuannya dapat menjurus pada suatu ketidakadilan. Tulisan kesepuluh ada tulisan dari Deni Nuryadi yang berjudul "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia" di mana hukum itu tidak berdiri sendiri. Hukum tidak sepenuhnya otonom dan punya otoritas absolut. Apabila pendekatan terhadap kehidupan hukum suatu bangsa hanya dengan menggunakan tolak ukur undang-undang, maka hasil yang diperoleh tidaklah memuaskan. Artinya, sulit untuk dapat memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang sebenarnya hanya dengan membaca peraturan perundangannya saja. Diperlukan potret kenyataan hukum yang hanya dapat dilihat melalui perilaku hukum sehari-hari. Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Hukum Progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional.

Tim Redaksi menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang merupakan kelemahan tersendiri baik dari segi desain cetak, substansi dan hal-hal lainnya. Untuk itu Tim Redaksi memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Demi penyempurnaan pada edisi-edisi selanjutnya, tim berharap dengan segala hormat, menerima saran dan pendapat serta kritikan dari para pembaca yang budiman.

Akhir kata Tim Redaksi berharap semoga kehadiran Jurnal edisi ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan para Pembaca mengenai dinamika pengaturan dan penerapan hukum di Indonesia dan juga bermanfaat dalam upaya membangun budaya sadar hukum. Semoga penjelasan pada setiap kalimat dan halaman dapat bermanfaat serta wujud pengembangan diri para penulis untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mewarnai ide dan saran membangun Hukum Indonesia. Dalam kesempatan ini Tim Redaksi memberikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Civitas Akademika Universitas Singaperbangsa Karawang, Para Penulis, Para Mitra Bestari yang

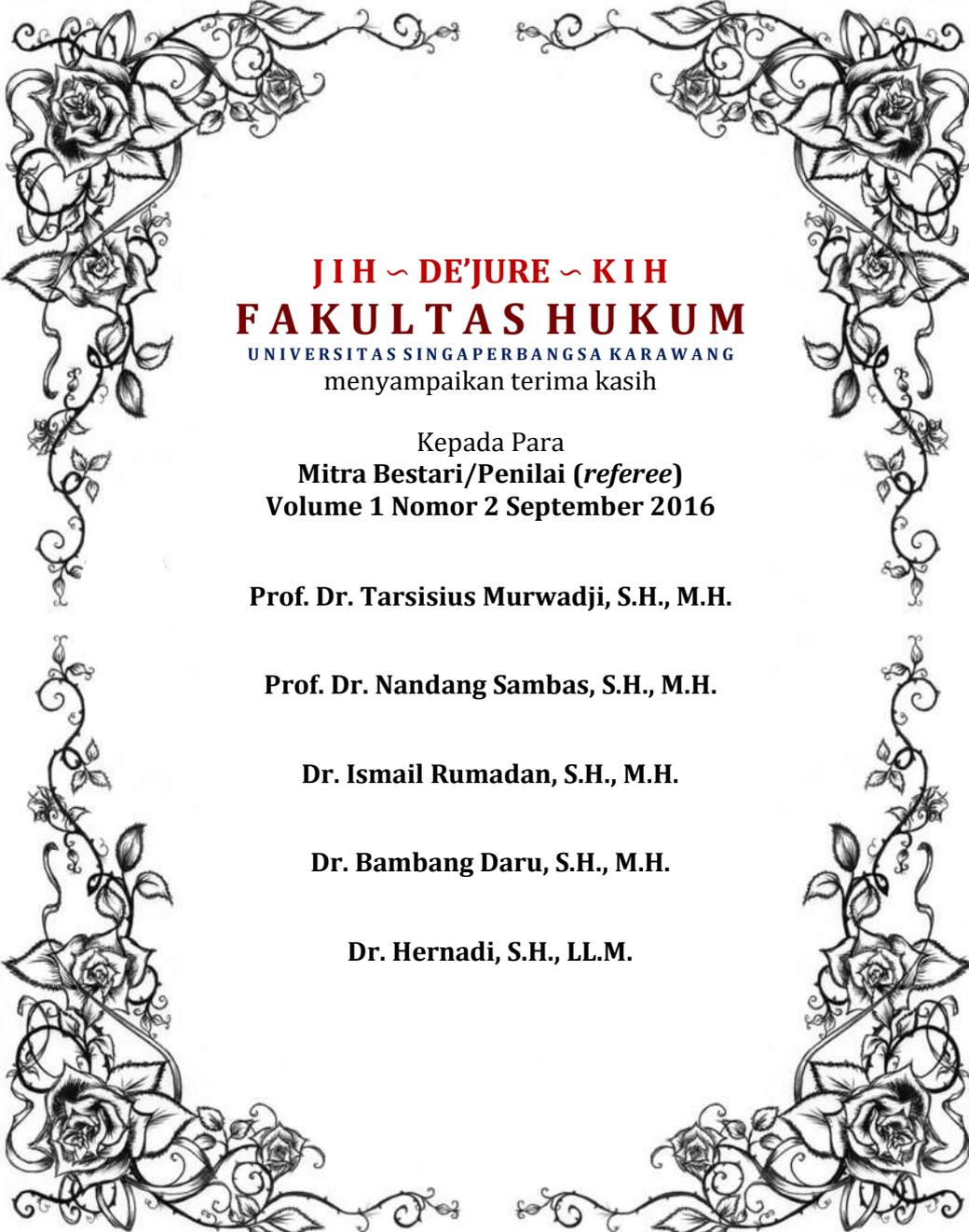
sudah meluangkan waktunya dalam kesibukannya yang padat. Semoga Tuhan selalu merahmati Alam Semesta ini beserta isinya.

Selamat membaca!

Tim Redaksi
Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi <i>JIH ~ De'Jure ~ KIH</i>	iv-vii
PENYELESAIAN SENGKETA MENGENAI HAK MILIK SERTA BAGIAN ANAK ANGKAT DALAM WASIAT WAJIBAH	
<i>Dedi Pahroji</i>	185-200
STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DAN IMPLEMENTASI-NYA ANTARA LEMBAGA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DAN <i>SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE</i>	
<i>Grasia Kurniati</i>	201-234
PENGARUH SISTEM MULTIPARTAI TERHADAP KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL MENURUT UUD NRI TAHUN 1945	
<i>Ida R. Hasan</i>	235-266
PENGATURAN PRAKTEK MEDIASI TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA	
<i>Imam Budi Santoso</i>	267-285
PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR SEBAGAI OBYEK <i>LANDREFORM</i> UNTUK LAHAN PERTANIAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN	
<i>Joko Satrianto Wibowo</i>	286-300
PENERAPAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN BAGI PELAKU PENCEMAR- AN CITARUM DI KARAWANG	
<i>M. Holyone Nurdin Singadimedja</i>	301-328
KEWENANGAN BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN PASCA BERLAKUNYA POJK NOMOR 1/POJK.07/2013 DAN POJK NOMOR 1/POJK.07/2014 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH DI INDONESIA	
<i>Nun Harrieti</i>	329-343
TINJAUAN NORMATIF TERHADAP TINGKAT PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA AUSTRIA	
<i>Rohendra Fathammubina</i>	344-362
HAK KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI DAN PENERAPANNYA DI REPUBLIK INDONESIA	
<i>R. Bagus Irawan</i>	363-393
TEORI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA	
<i>Deni Nuryadi</i>	394-408
Biodata Penulis	409-410
Pedoman Penulisan	411-418
Formulir Berlangganan	419



JIH ~ DE'JURE ~ KIH
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
menyampaikan terima kasih

Kepada Para
Mitra Bestari/Penilai (*referee*)
Volume 1 Nomor 2 September 2016

Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H.

Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H.

Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H.

Dr. Bambang Daru, S.H., M.H.

Dr. Hernadi, S.H., LL.M.